

SISTEM DEMOKRASI STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN

IMAM KHOMEINI DAN Ir. SOEKARNO



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**DISUSUN OLEH:
AHMAD WAHYUDIN
08360017**

**PEMBIMBING:
1. Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag.
2. AHMAD ANFASUL MAROM, S.H.I., MA.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013**

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

No. UIN. 02/K. PMH-SKR/P.P

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

Sistem Demokrasi Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Ir. Soekarno

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ahmad Wahyudin

NIM : 08360017

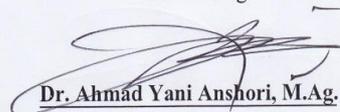
Telah dimunaqosyahkan pada : 10 Juli 2013

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

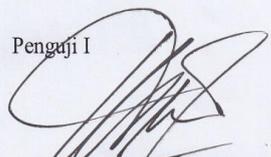
TIM MUNAQOSYAH

Ketua Sidang


Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.

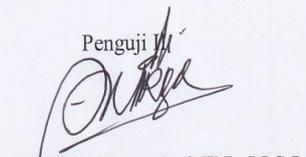
NIP. 19731105 199603 1 002

Penguji I


Udiyo Basuki, SH., M.Hum.

NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II


Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 005

Yogyakarta, 10 Juli 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum


Noorhaidi M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Wahyudin

Lamp :-

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Wahyudin

NIM : 08360017

Judul : SISTEM DEMOKRASI STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM
KHOMEINI DAN Ir. SOEKARNO

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1434 H

5 Juni 2013

Pembimbing I



Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M. Ag

NIP. 19731105 199603 1 002

SYARAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Wahyudin

Lamp : -

Kepada

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Wahyudin

N.I.M : 08360017

Judul : SISTEM DEMOKRASI STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN IMAM
KHOMEINI DAN Ir. SOEKARNO

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu kepada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

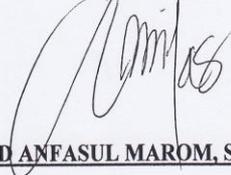
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1434 H

5 Juni 2013

Pembimbing II



AHMAD ANFASUL MAROM, S.H.I, MA.

NIP: 19811107 200912 2 003

ABSTRAK

Praktek demokrasi memang sampai sekarang masih sangat sering diperbincangkan di setiap negara. Sebagai sebuah proses, demokrasi diharapkan mencapai tujuan yang semaksimal mungkin sehingga dapat disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Demokrasi secara universal adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia. Sejarah dan dinamika kehidupan manusia, sejak dulu hingga sekarang lebih meneguhkan keunggulan demokrasi, dibanding dengan sistem-sistem politik yang lain termasuk Theokrasi. Konsep demokrasi pun semakin berkembang seiring dengan perubahan sosial politik suatu Negara. Sehingga hal ini bermunculan beragam istilah dari demokrasi. Hal ini pun semakin menarik ketika dalam suatu pemerintahan yang menganut demokrasi diinterpretasi menurut agama atau budaya.

Dalam hal ini penulis ingin mengungkapkan pandangan kedua tokoh revolusi yaitu Imam Khomeini dan Ir. Soekarno mengenai sistem demokrasi dalam pemerintahan suatu Negara. Pandangan Imam Khomeini terhadap demokrasi yang diinterpretasikan dengan agama memberikan corak tersendiri terhadap implementasinya. Sedangkan Ir. Soekarno yang memegang teguh terhadap budaya berdampak pada demokrasi yang dijalankannya ketika berkuasa. Dan dari sinilah pastinya kedua tokoh ini mempunyai perbedaan dan persamaan. Baik dalam segi pandangan maupun praktek atau pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Penulisan skripsi ini tentunya menggunakan metodologi komparasi atau perbandingan pemikiran kedua tokoh tersebut. Penulis meneliti pemikiran kedua tokoh ini lewat kajian pustaka yang mengacu pada berbagai sumber yang telah diteliti sebelumnya. Meskipun sudah banyak penulis yang telah melakukan kajian terhadap masing-masing tokoh ini dan membandingkan dengan tokoh yang lain, tapi untuk sampai pada penulis melakukan penelitian ini belum ditemukan yang membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut.

lewat penelitian ini, ternyata pandangan demokrasi Imam Khomeini tidaklah demokrasi murni, melainkan lebih pada istilah Teo-demokrasi termasuk dalam pelaksanaannya dalam pemerintahan. Sedangkan Ir. Soekarno bersikap otoriter dibalik istilah demokrasi asli Indonesia atau yang lebih dikenal dengan demokrasi terpimpin.

MOTTO

*“melakukan yang baik lebih baik
daripada mengucapkan hal yang terbaik”*



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada:

- 1. Untuk orang yang paling istimewa, Bapak dan ibu yang saya sayangi, hormati dan banggakan. Yang selalu menyayangi dan disayangi Allah SWT dan selalu mencurahkan segala nasihat dan do'anya untuk anak-anaknya tiada henti dan tak pernah mau untuk berhenti. Yang kenal lelah tapi tak pernah merasa lelah hanya untuk anak-anaknya.*
- 2. Kakak, adik dan semua keluarga yang tak pernah bosan mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. untuk semua teman-teman jurusan PMH '08, teman-teman HMI (MPO) Nur Laila, Emi, Sri Rahayu, Zulfa, Muhtar, Taufiqurahman, Rusdi, Gofur, Tamam, Alam, Kamal sebagai penyedia buku referensi DBR dan semua yang pernah mampir ke MARAKOM Institute.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.

اما بعد .

Segala puji bagi Allah yang SWT, yang senantiasa memberikan karunianya bagi seluruh umat di dunia, shalawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada nabi dan Rasul, serta keluarganya sahabat dan para pengikut mereka sampai hari akhir tiba.

Berkat rahmat dan inayah dari Allah SWT, penyusun berhasil menyelesaikan Tugas Akhir perkuliahannya berupa skripsi, sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Tak lupa, penulis haturkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asyari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Sodikin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag, selaku Pembimbing I, yang selalu memberi arahan dalam penyusunan Skripsi
5. Bapak Ahmad Anfasul Marom, S. HI, MA, selaku Pembimbing II yang memberi masukan dan saran.

6. Orang tua yang penyusun sayangi, hormati dan banggakan, Bapak Suwanto dan Ibu Darsiti yang ikhlas selalu memberikan dukungan moril dan materiil, serta do'a yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
7. kakak, adik, saudara-saudara dan keluarga saya.
8. Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Para Ustadz dan Guru Mengaji yang telah memberikan banyak ilmu agama.
10. Semua teman-teman PMH angkatan 2008/2009 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta..
11. Serta teman-teman yang telah banyak membantu selesainya skripsi ini yang selalu saya banggakan.

Semoga Allah memberi balasan kebaikan kepada mereka semua yang telah mendukung proses penyelesaian Skripsi ini. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam Smembuat kripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Akhirnya semoga bermanfaat bagi para pembaca.

Yogyakarta, 24 Rajab 1434 H
3 Juni 2013 M.
Penyusun.

Ahmad Wahyudin
NIM : 08360017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi bersumber pada pedoman transliterasi Arab-Latin yang diangkat dari keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia , nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b//u/1987, selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf, dalam tulisan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut:

ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Šā'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Ḥā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	Ka dan ha
د	Dāl	d	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	Er
ز	Zā'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṣād		Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓā'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Ghain	g	Ge

ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	El
م	Mīm	m	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	w	We
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

2. Vokal

a. Vokal tunggal:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َی	Fathah dan Ya	Ai	a-i
◌َو	Fathah dan Wawu	Au	a-u

Contoh :

كيف.....kaifa

حول.....hāula

c. Vokal Panjang (maddah)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah dan alif	Ā	A dengan garis di atas
◌ِ	Fathah dan ya	Ī	A dengan garis di atas
◌ِ	Kasrah dan ya	Ū	I dengan garis di atas

وُ	Dāmmah dan wawu	Ū	U dengan garis diatas
----	-----------------	---	-----------------------

Contoh:

قال.....qala قيل.....qīla
رمى.....rama يقول.....yaqūlu

3. Ta Marbutah

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h".
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال"("al-"), dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة الاطفال.....Raudāh al-Atfāl
المدينة المنورة.....al-Madīnah al-Munawwarah
شجرة.....Syajarah

4. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نزل....Nazzala
البر....Al-birru

- Kata Sambung "ال" jika bertemu dengan huruf qamarriyyah ditransliterasikan dengan "al" diikuti dengan tanda penghubung "-".

Contoh:

القلم.....Al-qalamu
الشمس.....Asy-syamsu

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد إلا رسول.....Wa mā Muhammadun illā rasūl



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM DEMOKRASI.....	18
A. Sejarah Demokrasi	18
B. Pengertian Demokrasi	25
C. Relevansi Islam dan Demokrasi.....	30

BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN IMAM KHOMEINI DAN Ir. SOEKARNO TENTANG SISTEM DEMOKRASI.....	36
A. Imam Khomeini: Sekilas Biografi dan Pemikirannya.....	36
1. Pendidikan dan Perjalan Hidupnya	36
2. Karya dan Pemikirannya	41
B. Pemikiran Imam Khomeini tentang Sistem Demokrasi	45
1. Paradigma Pemikiran	45
2. Khomeini tentang Demokrasi	50
C. Ir. Soekarno : Sekilas Biografi dan Pemikirannya	53
1. Pendidikan dan Perjalan Hidupnya	53
2. Karya dan Pemikirannya	64
D. Pemikiran Ir. Soekarno tentang Sistem Demokrasi.....	69
1. Paradigma pemikiran	69
2. Ir. Soekarno tentang Demokrasi.....	72
BAB IV: PERBANDINGAN: PERBEDAAN DAN PERSAMAAN.....	77
A. Tentang Paradigma Pemikiran	77
B. Tentang Demokrasi	81
C. Implementasi Demokrasi Imam Khomeini dan Ir. Soekarno.	85
BAB V: PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Definisi Istilah.....	I
2. UUD 45 Pasal 33 sebelum amandemen.....	IV
3. Konstitusi Republik Islam Iran Pasal 110.....	V
4. Biografi Tokoh.....	VI
5. Biodata Penulis	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktek demokrasi memang sampai sekarang masih sangat sering diperbincangkan di setiap negara. Sebagai sebuah proses, demokrasi diharapkan mencapai tujuan yang semaksimal mungkin sehingga dapat disepakati bersama dalam suatu masyarakat. Akan tetapi, demokrasi adalah cara yang mempunyai tingkat kesulitan tinggi dalam prosesnya. Dengan kata lain, demokrasi merupakan cara terdekat dengan fitrah manusia yang bisa mentoleransi semua keadaan, tetapi merupakan cara yang paling sulit dilakukan untuk mencapai tujuan.

Demokrasi secara universal adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dan sistem pengorganisasian masyarakat paling baik yang dibuat oleh manusia. Sejarah dan dinamika kehidupan manusia, sejak dulu hingga sekarang lebih meneguhkan keunggulan demokrasi, dibanding dengan sistem-sistem politik yang lain termasuk Theokrasi.

Sedang secara historis, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad ke-5 SM, yang pada awalnya sebagai respon terhadap pengalaman buruk monarkhi

dan kediktatoran di negara-negara kota Yunani kuno.¹ Hanya saja harus diingat bahwa demokrasi di Yunani kuno berbeda dengan demokrasi modern. Hak memilih dalam demokrasi Yunani kuno hanya diberikan kepada penduduk asli, sedang penduduk luar itu tidak berhak memberikan suara.

Abraham Lincoln (1863) mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*Government of the people, by the people, for the people*). Konsep demokrasi kemudian berkembang dengan kondisi sosial politik suatu negara. Sebagaimana tercermin dari beragamnya istilah demokrasi; demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila, demokrasi sosial. Namun demikian konsep demokrasi yang berkembang secara umum dibagi menjadi dua, yakni demokrasi liberal dan demokrasi komunis.²

Wacana negara demokrasi semakin menarik ketika agama mencoba memberikan interpretasi tentang keberadaannya. Imam Khomeini dan Soekarno berusaha memberikan interpretasi konseptual tentang demokrasi dengan berdasarkan keyakinan agamanya.

¹ Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna; Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Cet I (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 71.

² <http://poetracerdas.blogspot.com/2009/04/demokrasi-liberal-demokrasi-komunis-dan.html> (diunduh 7/2/2012 11:22)

Dalam pandangan Imam Khomeini, negara adalah instrumen bagi pelaksanaan Undang-Undang Tuhan di muka bumi, sehingga negara yang diinginkan Imam Khomeini adalah negara Islam yang berdasarkan hukum Tuhan atas manusia. Dalam beberapa pemikiran politiknya, Khomeini tampaknya mengkritisi dan menyalahkan demokrasi ala Barat yang justru telah berkembang di dunia Timur, khususnya dunia Islam. Untuk itu, umat Islam harus mengajarkan kepada orang-orang Barat tentang makna demokrasi yang sebenarnya. Ia menawarkan model baru demokrasi yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyebut sebagai “demokrasi sejati”. Bagi Khomeini, yang dimaksud dengan demokrasi sejati adalah Islam. ”Inilah demokrasi. Bukan yang berasal dari Barat, yang sangat kapitalis. Bukan pula demokrasi yang diterapkan di Timur, yang telah melakukan penindasan pada rakyat jelata”.³

Sedangkan pandangan dari Imam Khomeini mengenai demokrasi itu sendiri, sejauh sistem demokrasi berjalan dan tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, maka itu dianggap baik. Ia menghargai hak rakyat dalam berpolitik tetapi ia tidak memandang sama dalam mengartikan demokrasi dan implementasinya. Demokrasi yang dipraktekan Barat tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sekalipun ia memandang bahwa suara rakyat harus dihargai dan diperhitungkan sebagai bentuk adanya kedaulatan rakyat. Namun kedaulatan

³ Penjelasan ini dikutip Hamid Hadji Haydar dalam “*filsafat politik imam Khomeini*” dalam Jurnal *Al-Huda*, vol. III, no 4, 2001, hlm 62.

Tuhan haruslah diposisikan berada di atas segalanya, karena yang berlaku adalah hukum Tuhan bukannya hukum yang dibuat manusia.

Khomeini menegaskan, bahwa rakyat memiliki otoritas dalam mewujudkan pemerintahan. Dengan kata lain, ia menganggap bahwa pemerintahan sebagai perwujudan kehendak rakyat. Jika kita melihat dari segi demokrasi benar yang disampaikan oleh Khomeini, namun berbanding terbalik dengan apa yang dikatakannya bahwa kedaulatan Tuhan tetap yang tertinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Khomeini tidak sepenuhnya demokrasi, melainkan tetap cenderung pada Theokrasi.

Sedangkan Soekarno mempunyai pandangan sendiri mengenai konsep dari demokrasi. Memaknai sebuah demokrasi dari Soekarno tidak bisa terlepas dari historisnya yang mempengaruhi pemikirannya tentang demokrasi, di mana pengaruh peran budaya dan pendidikan yang membuat kanal pemikirannya tersebut di aplikasikan terhadap negara yang dipimpinnya.

Jika Imam Khomeini mempunyai suatu konsep negara yang dikenal dengan “demokrasi sejati”, Ir. Soekarno pun terkenal dengan konsep negara yang dikenal dengan “demokrasi terpimpin”. Esensi dari demokrasi menurut Z.A. Maulani adalah, kedaulatan ada di tangan rakyat. Paham demokrasi memposisikan rakyat sebagai sumber kedaulatan dan penyelenggaraan

kedaulatan.⁴ Pengertian ini sama dengan makna inti dari demokrasi menurut Soekarno, bahwa inti dari demokrasi adalah pemerintahan rakyat.⁵

Penerimaan Soekarno tentang demokrasi tidak sama seperti yang disampaikan atau dipraktikkan oleh Imam Khomeini. Dalam menjalankan pemerintahannya, Soekarno bersikap otoriter yang berlandung pada sistem demokrasi, Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahannya, seperti ikut campur dalam urusan legislatif dan yudikatif, serta pembatasan terhadap partai politik. Begitu halnya dengan agama, Soekarno tidak menerima bahwa agama telah mengatur tentang semuanya termasuk negara atau sistem pemerintahan. Hal ini yang membedakan praktek demokrasi yang dilakukan oleh Khomeini.

Sehingga dari gambaran di atas menjadi signifikansi masalah adalah paradigma kedua tokoh tentang sistem demokrasi. Yang dalam masa kontemporer telah memunculkan dua aliran besar dalam negara. *Pertama* aliran kelompok teokrasi yang mendambakan penyatuan agama dan negara dalam dasar negara, *kedua* aliran sekulerisme yang menginginkan dasar negara tanpa agama.

⁴ Z.A. Maulani, *Demokrasi dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: CRDS Kalimantan Pustaka Pelajar, 2000), hlm, 53.

⁵ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*. (Jakarta: Panitia Penerbit Buku Di Bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm, 171.

Penelitian dilakukan kepada dua tokoh tersebut karena keduanya sama-sama mempunyai *sense of crisis* terhadap kondisi negara dan sistem pemerintahan pada masanya. Imam Khomeini resah terhadap rezim Syah Pahlevi pada pola pemerintahan monarkhi yang dijalankannya yang pandangannya jauh dari Islam. Bahkan Imam Khomeini berhasil menggulingkan pemerintahan Pahlevi dengan jalan Revolusi Islam yang akhirnya merubah menjadi Republik Islam Iran dengan sistem pemerintahan yang berbeda dengan negara lainnya.

Konsep demokrasi ala Imam Khomeini sama halnya dengan pendapat dari Abu 'Ala al-Maududi yaitu Teo-demokrasi. Kedaulatan tidak sepenuhnya ada ditangan rakyat, rakyat hanya sebagai pelaksana hukum Tuhan. Otoritas atau kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Tuhan, segala aturan kehidupan manusia di bumi telah diatur oleh hukum Tuhan.

Sedangkan Soekarno yang dikenal dengan demokrasi terpimpinnya berbeda dengan demokrasi secara prakteknya, tidak adanya pemilihan umum, kebebasan pers yang dikontrol. Praktek demokrasi ini tidaklah sejalan dengan semestinya, sehingga kekuasaan tetap berada di tangan seorang pemimpin. Namun, Soekarno tetap beranggapan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat, bukan pada tatanan kedaulatan Tuhan.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan Imam Khomeini dan Ir. Soekarno tentang sistem demokrasi?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan kedua tokoh tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Penelitian ini bertujuan:

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan secara obyektif data-data faktual tentang Imam Khomeini dan Ir. Soekarno, khususnya pemikiran tentang sistem demokrasi. Sekaligus mencari titik perbedaan dan persamaan di antara keduanya.

2. Kegunaan penelitian ini:
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran untuk memperluas wawasan intelektual tentang kajian tokoh dalam bidang politik.
 - b. Upaya penggambaran secara komprehensif sosok Imam Khomeini dan Ir. Soekarno dalam hal konstruksi pemikiran politiknya.
 - c. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam hal ketatanegaraan.

D. Telaah Pustaka

Imam Khomeini adalah tokoh Islam abad ke-20 yang mempunyai kepedulian terhadap keadaan masyarakat, bangsa, dan negara. Dan secara gemilang atas keberhasilannya telah melakukan Revolusi Islam di negaranya, serta sebagai sosok yang fenomenal dalam sejarah islam. Begitu juga dengan Soekarno sebagai sosok pemimpin pada masa perjuangan merebut kemerdekaan atau pun revolusi kemerdekaan Indonesia. Karena dari kedua tokoh ini yang cukup fenomenal yang bisa dikatakan sebagai *founding fathers* dari negaranya yang cukup menarik bagi beberapa ilmuwan untuk menggali pemikiran kedua tokoh tersebut.

Adapun kajian yang telah dikemukakan dalam penelitian lewat skripsi mengenai demokrasi menurut pandangan Imam Khomeini dan Ir. Soekarno diantaranya adalah skripsi saudara Maksun yang berjudul *Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Kuntowijoyo tentang Negara dan Demokrasi*⁶ dan penelitian skripsi lain oleh Joni Amran yang berjudul *Demokrasi dalam Pandangan Ayatullah Imam Khomeini*⁷ yang keduanya menjelaskan tentang pandangan Imam Khomeini tentang demokrasi dari pandangan agama khususnya.

⁶ Maksun, *Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Kuntowijoyo tentang Negara dan Demokrasi*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2003.

⁷ Joni Amran, *Demokrasi dalam pandangan Ayatullah Imam Khomeini*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Kemudian penelitian skripsi lainya ialah karya Sri Puji Wahyuni yang berjudul *Pemikiran Ir. Soekarno tentang Demokrasi*⁸ dan skripsi lainnya adalah karya Salahuddin yang berjudul *Demokrasi Menurut Soekarno dan Muhammad Hatta (studi perbandingan)*⁹ yang isinya membahas tentang pandangan Bung Karno mengenai demokrasi.

Dalam beberapa hasil penelitian di atas yang telah mengkaji tentang demokrasi telah ditemukan banyak oleh penulis. Namun sampai saat penulis skripsi ini mengkaji penelitian tersebut belum menemukan penelitian skripsi yang mengkaji tentang pemikiran Imam Khomeini dan Ir. Soekarno dalam pandangannya tentang demokrasi dalam studi perbandingan pemikiran.

E. Kerangka Teoretik

Demokrasi telah menjadi istilah yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia tentang tatanan sosial-politik yang ideal. Bahkan, mungkin untuk pertama kali dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Kedudukan yang sentral dari demokratis ini telah meluluhlantahkan teori-teori lainnya

⁸ Sri Puji Wahyuni , *Pemikiran Ir. Soekarno tentang Demokrasi*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2002.

⁹ Salahuddin, *Demokrasi Menurut Soekarno dan Muhammad Hatta (studi perbandingan)*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2004.

mengenai tatanan kekuasaan yang baik, yang pernah ditawarkan oleh kalangan filsuf, ahli hukum, dan pakar ilmu politik.¹⁰

Demokrasi merupakan salah satu di antara sistem politik yang paling diminati dan paling dipercaya oleh mayoritas kelompok masyarakat di dunia. Minat dan kepercayaan itu muncul karena demokrasi bukan saja telah melewati uji verifikasi sejarah yang cukup kompleks dan panjang, tetapi secara faktual demokrasi juga telah menunjukkan kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara yang adil, egaliter dan manusiawi.¹¹

Jika kita melihat dari pendapatnya al-Maududi sebagai salah satu tokoh pemikir politik islam, ia mempunyai gagasan tentang kenegaraan menurut Islam. Di antaranya; *Pertama*, Islam adalah suatu agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik dengan arti di dalam Islam terdapat pula sistem politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam tidak perlu atau bahkan dilarang meniru sistem Barat, cukup kembali pada sistem Islam dengan menunjuk kepada pola politik semasa Al-Khulafa al-Rasyidin sebagai model atau contoh sistem kenegaraan menurut Islam. *Kedua*, kekuasaan tertinggi,

¹⁰ Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm 1.

¹¹ Umarudin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 13.

yang dalam istilah politik disebut kedaulatan, adalah kepada Allah, dan umat manusia hanyalah pelaksana-pelaksana kedaulatan Allah tersebut sebagai khalifah-khalifah Allah di bumi. Dengan demikian maka tidak dapat dibenarkan gagasan *kedaulatan rakyat*, dan sebagai pelaksana kedaulatan Allah umat manusia atau negara harus tunduk kepada hukum-hukum yang sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, sedangkan yang dimaksud khalifah-khalifah Allah yang berwenang melaksanakan kedaulatan Allah itu adalah (hanya) umat atau orang-orang laki-laki dan perempuan Islam. *Ketiga*, sistem politik Islam adalah suatu sistem universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan-ikatan geografi, bahasa dan kebangsaan.¹² Ketiga gagasan kenegaraan tersebut merupakan landasan bagi demokrasi. Namun yang lebih kita kenal dalam gagasan Al-Maududi ialah Teo-demokrasi.

Sedangkan menurut Fahmi Huwaydi dalam bukunya *Demokrasi Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*, menyebutkan bahwa ada beberapa prinsip dasar pemerintahan yang bisa digali dari sumber islam (1) keadilan dan musyawarah, (2) kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat, (3) kebebasan adalah hak semua warga, (4) persamaan di antara sesama, terutama

¹² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah, dan pemikiran* cet I (Jakarta: UI-Press, 1990), hlm 166.

dimuka hukum, (5) undang-undang di atas segalanya, (6) pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat.¹³

Melihat dari perjalanan politik Indonesia, kita mengetahui adanya sistem pemerintahan otoriter dibalik istilah demokrasi. Demokrasi itu adalah demokrasi terpimpin. Sebenarnya esensi demokrasi adalah bahwa kedaulatan tertinggi dalam suatu Negara berada ditangan rakyat. Dan kedaulatan ini barulah dapat dipandang sah bila rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang dipilih, diberi kebebasan dan hak penuh untuk turut serta dalam membuat keputusan-keputusan apa pun yang penting bagi bangsa dan Negara. Hak politik rakyat ini tidak boleh diganggu gugat. Ia adalah sesuatu yang suci. Suatu sistem demokrasi formal tapi dengan budaya politik otoriter adalah hipokrit. Demokrasi terpimpin menurut pengamatan kita adalah sistem politik yang hipokrit ini.¹⁴

Sistem yang demokratis didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dengan demikian, rakyat diasumsikan paling sedikit sama kuat, atau lebih kuat daripada pemerintah. Bila pemerintah lebih kuat dari rakyat, biasanya yang terjadi adalah sistem otoriter. Kalau pemerintah yang lebih kuat ini

¹³ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani: Isu-Isu Besar Politik Islam*, Alih bahasa, Muhammad Abdul Gaffar E.M (Bandung: Mizan, 1996), hlm 160-167.

¹⁴ A. Syafi'I Ma'arif, *Islam dan Politik Di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988) hlm, 132.

menyelenggarakan sistem politik yang demokratis, demokrasi ini hanya merupakan demokrasi pinjaman. Bilamana kemudian pemerintahan merasa kurang berkenan dengan demokrasi yang diberikan, dia dengan mudah menariknya kembali.¹⁵

Demokrasi dianggap sebagai kata yang mengimplikasikan nilai-nilai perjuangan untuk kebebasan jalan hidup yang lebih baik. Demokrasi bukan hanya merupakan metode kekuasaan mayoritas melalui partisipasi rakyat dan kompetisi yang bebas, tetapi juga mengandung nilai universal khususnya persamaan, kebebasan dan pluralisme, walaupun konsep operasionalnya bervariasi menurut kondisi budaya tertentu.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menjadikan bahan pustaka sebagai sumber (data) utama. Sehingga lebih sebagai penelitian dokumenter (*documentary research*). Dalam penelitian ini objek kajian adalah pemikiran politik, tokoh dalam hal ini adalah Imam Khomeini dan Ir. Soekarno.

¹⁵ Arief Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996) hlm, 31.

¹⁶ Maskuri Abdilah, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999). Hlm, 74.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif yaitu menguraikan pemikiran Imam Khomeini dan Ir. Soekarno secara sistematis dan seobyektif mungkin. Serta membandingkan pemikiran kedua tokoh tersebut untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapatnya tentang sistem demokrasi.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik untuk penulisan skripsi ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu, data-data diambil dari sumber kepustakaan, baik berupa buku, buletin, majalah, jurnal dan sumber-sumber yang berkaitan. Buku , *Biografi Politik Imam Khomeini, Mata Air Kecemerlangan ; Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini, Antara Al-Farabi dan Khomeini; Filsafat Politik Islam, Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I dan II, Soekarno, Islam dan Nasionalisme* menjadi sumber data primer sedang tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan menjadi sumber data sekunder.

4. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan instrumen deduktif dan komparatif. Deduktif yaitu logika berfikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang umum untuk kemudian memberikan

penilaian terhadap hal-hal yang bersifat khusus.¹⁷ Dalam hal ini penulis akan menjelaskan tentang demokrasi secara umum yang kemudian dikerucutkan atau lebih dikhususkan pada pendapat kedua tokoh tersebut mengenai demokrasi.

Sedang metode komparatif menjelaskan relasi dari dua sistem pemikiran. Dalam perbandingan, sifat hakiki dari objek penelitian dapat menjadi lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaaan sehingga hakekat objek dipahami dengan semakin murni.¹⁸ Dengan ini akan ditemukan hasil pemikiran atau gagasan mengenai demokrasi dalam lingkaran persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut secara terperinci.

5. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan: pendekatan *historis-sosiologis* yaitu pendekatan yang menggambarkan tentang proses terjadinya perilaku (pemikiran) sekaligus sudut posisi manusia yang membawanya pada proses perilaku (pemikiran) tertentu.

G. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah untuk dipahami, maka penulis membagi penulisan ini pada beberapa bab dan sub bab yang memang perlu untuk dituliskan.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm, 4.

¹⁸ Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm 50.

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan yang terdiri dari tujuh sub bab: Latar belakang masalah, Pokok masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Telaah pustaka, Kerangka teoretik, Metode penelitian dan Sistemetika pembahasan.

Selanjutnya masuk bab kedua yang membahas tinjauan secara umum tentang sistem demokrasi, yang terdiri dari tiga sub bab, sub bab pertama sejarah demokrasi, sub bab kedua pengertian demokrasi dan sub bab ketiga tentang relevasnsi Islam dan Demokrasi.

Kemudian bab tiga merupakan sketsa biografi Imam Khomeini dan Soekarno, diuraikan dalam empat sub bab. Sub bab pertama membahas sekilas biografi dan pemikiran Imam Khomeini, meliputi pendidikan dan perjalanan hidupnya, dan karya dan pemikirannya. Sub bab kedua membahas pemikiran politik Imam Khomeini, yang meliputi paradigma pemikiran, sistem demokrasi. Sub bab ketiga membahas sekilas biografi dan pemikirannya Soekarno, meliputi pendidikan dan perjalan hidupnya, karya dan pemikirannya. Sub bab keempat, menjelaskan pemikiran politik Soekarno, dengan membahas paradigma pemikiran sistem demokrasi.

Bab keempat menguraikan perbandingan: perbedaan dan persamaan yang terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama tentang paradigma pemikiran, sub bab kedua membahas khusus mengenai sistem demokrasi menurut kedua

tokoh tersebut dan sub bab ketiga tentang implementasi pemikiran Imam Khomeini dan Ir. Soekarno. Dan terakhir bab ke-lima merupakan kesimpulan tentang pemikiran Imam Khomeini dan Soekarno yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini pada bab-bab sebelumnya yang telah dituliskan, sebenarnya penelitian ini ditujukan sebagai upaya memberikan kontribusi pemikiran tokoh revolusi yang berkenaan dengan pandangannya tentang demokrasi dan pelaksanaan demokrasi yang ideal menurut kedua tokoh ini.

Imam Khomeini dan Ir. Soekarno adalah dua tokoh revolusi yang mempunyai latar belakang yang berbeda, namun keduanya muncul untuk menegaskan sikap yang kritis terhadap kondisi realitas kebangsaan pada masanya.

Dari berbagai penjelasan pada bab-bab sebelumnya untuk membedakan kedua tokoh tersebut sebagai tokoh politik atau sebagai pemikir. Bahwa Imam Khomeini dan Bung Karno selain sebagai tokoh politisi dalam artian yang berperan aktif di roda pemerintahan dan sekaligus sebagai aktor utama pada massa revolusi Negara kedua tokoh tersebut. Tetapi kedua tokoh tersebut dalam politik praktisnya berdasarkan hasil pergulatan pemikiran mereka, mereka pun mewariskan pemikiran-pemikiran yang berguna sampai sekarang dan masih banyak yang mengkajinya sebagai bahan penelitian.

Hal tersebut bisa dilihat dari berupa karya yang dihasilkan kedua tokoh tersebut, yaitu berupa tulisan karya mereka yang merupakan hasil pemikiran dan analisis mereka dari realitas yang ada pada masa itu. Imam Khomeini dan Bung Karno merealisasikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam hal politik praksis yang dijalankan dalam wujud roda pemerintahan. Sehingga bisa dikatakan kedua tokoh ini bukan hanya sebagai tokoh politik saja, melainkan sekaligus sebagai pemikir dalam bidang politik atau tata negara khususnya.

1. Ada pun pandangan Imam Khomeini dan Bung Karno mengenai demokrasi sebagai berikut:

Imam Khomeini berpandangan bahwa, demokrasi liberal (barat) yang meniscayakan kedaulatan penuh pada rakyat adalah bukan demokrasi yang sesungguhnya. Bagi Khomeini, demokrasi adalah Islam sejati. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat dengan berpegang pada hukum Tuhan. Sekalipun Imam Khomeini memberikan kebebasan kepada rakyat sebagai bentuk pemerintahan rakyat, tetapi Imam Khomeini memberikan peringatan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Tuhan dan rasul-Nya. Maka, dalam hal ini Imam Khomeini menegaskan bahwa yang ada hanyalah kedaulatan Tuhan. Istilah demokrasi ini tepatnya dinamakan dengan teo-demokrasi. Disamping itu, dalam hal kepemimpinan Imam Khomeini mendasarkan pada konsep wilayatul faqih (kepemimpinan faqih), yang mempunyai peran sebagai pengganti Imam ke-12 yang masih

ghaib menurut keyakinan Syi'ah, untuk melaksanakan hukum Islam. Berbeda dengan Imam Khomeini, pandangan Bung Karno tentang demokrasi ialah pemerintahan rakyat, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Namun dari segi normatif berbanding terbalik dengan empirik. Demokrasi yang kedaulatan berada ditangan rakyat tidak terlaksana, kekuasaan atau kedaulatan sepenuhnya ada ditangan pemimpin. Dalam sistem roda pemerintahan bersifat otoriter, segala kebijakan sosial, ekonomi dan politik ada ditangan pemimpin. Dan sistem ini yang disebut dengan demokrasi terpimpin.

Imam Khomeini dan Bung Karno berpandangan bahwa demokrasi murni (barat) tidak bisa diterapkan di Negara mereka. Sehingga, kedua tokoh tersebut mempunyai cara sendiri pelaksanaan demokrasi tersebut. Imam Khomeini berpandangan bahwa demokrasi murni (barat) tidak sejalan dengan ajaran Islam, kedaulatan rakyat harus dihormati, tetapi kedaulatan Tuhan yang paling tinggi. Bung Karno sendiri berpandangan bahwa demokrasi barat yang liberal hanya membawa kesejahteraan politik saja, tidak adanya kesejahteraan bagi rakyatnya. Sehingga Bung Karno berpandangan bahwa dalam demokrasi rakyat mempunyai kekuasaan yang teratur dan tepimpin.

Kedua tokoh tersebut tidaklah mementingkan arti atau konsep demokrasi dari barat, melainkan yang terpenting proses bagaimana demokrasi itu berjalan di negaranya untuk mencapai tujuan dari demokrasi. Entah itu

Teo-demokrasi atau demokrasi terpimpin, itulah pandangan mereka terhadap apa itu demokrasi bisa kita lihat dari proses pelaksanaan demokrasi yang kedua tokoh ini laksanakan.

2. Sedangkan untuk perbedaan dan persamaan dari kedua tokoh tersebut ialah:

Dalam hal paradigma, Imam Khomeini mendasarkan pada pandangan tauhid mazhab Syi'ah yang memberikan tuntunan yang lebih luas terhadap urusan-urusan manusia dalam kemasyarakatan, termasuk didalamnya pemerintahan Islam. Konsep ini meniscayakan adanya penyatuan antara agama dan politik. Implikasi dari pandangan tersebut Imam Khomeini meyakini bahwa Islam merupakan ajaran yang sangat komprehensif. Ia menyangkut, politik, sosial, budaya, ekonomi dengan kecenderungan pemikiran skriptualistik-idealistik.

Sedangkan Ir. Soekarno dalam hal paradigma pemikiran lebih berdasar pada budaya atau tepatnya mistisme Jawa yang khususnya dari seni tradisi wayang yang memberikan pandangan pada dirinya dalam menghadapi realitas kondisi pada masa itu. sinkretisme terhadap tiga golongan ideology yaitu *nasionalisme*, *islamisme* dan *marxisme* yang sangat berpengaruh sebagai implikasi pada pelaksanaan ekonomi, sosial dan politiknya.

Sedikit sekali dari persamaan kedua tokoh ini, paradigma kedua tokoh tersebut yang menjadikan keduanya sebagai tokoh revolusi untuk

melawan imperialisme dan kapitalisme barat. Kedua tokoh tersebut bersikap hati-hati terhadap barat, sama-sama menggagas konsep baru dari demokrasi.

B. Saran

Pemikiran seorang tokoh merupakan manifestasi dari pergolakan yang terjadi pada diri dan lingkungannya dalam ruang dan waktu tertentu. Dengan demikian tidak salah ketika dalam perkembangan pemikirannya tidak konteks lagi. Sehingga menjadi niscaya bagi pecinta politik untuk terus melakukan kajian secara kritis terhadap produk sebuah pemikiran.

Penyusun menyadari bahwa telaah ini belum cukup mampu mengungkapkan secara detail dan komprehensif terhadap pandangan kedua tokoh tersebut mengenai demokrasi. Untuk itu perlu adanya kajian lebih lanjut lagi mengenai demokrasi menurut kedua tokoh ini yang sesuai dengan perubahan zaman itu sendiri. Hasil pemikiran kedua tokoh tersebut tentang demokrasi apakah masih relevan untuk diimplementasikan bagi Negara bekas pimpinannya ataukah perlu gagasan atau pemikiran baru mengenai demokrasi lainnya. Ketika perubahan zaman menuntut bagaimana manusia sulitnya mengimplementasikan demokrasi bagi persoalan individual, sosial, negara maupun lintas Negara. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fiqh/ushul fiqh

Al-Maududi, Abu A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Bandung : Mizan, 1995.

Al-Maududi, *Teori Politik Islam*, diterjemahkan dari Political Theory Of Islam, H. Adnan, Syamni (Pen), cet. I Jakarta: Media Dakwah, 1985.

Enayat, Hamid, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1988.

Huwaydi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani; Isu-Isu Besar Dalam Pemikiran Politik Islam*, Terj, M. Abdul Ghafur, Bandung: Mizan, 1996.

Ma'arif, Syafi'I, *Studi Tentang Percaturan dalam Konstituante; Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1987.

Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah, dan pemikiran*, cet I Jakarta: UI-Press, 1990.

B. Buku umum

Abdillah, Maskuri, *Demokrasi di Persimpangan Makna, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*, Yogyakarta: Tria Wacana, 1999.

- Alam, Wawan Tunggul, *Demi Bangsaaku : Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Algar, Hamid dan Robin W. Calsen, *Mata Air Kecemerlangan, Sebuah Pengantar untuk Memahami Pemikiran Imam Khomeini*, Zaenal Abidin (pen), cet. V, Bandung: Mizan, 1996.
- Baker, Anton dan Charis Zubeir, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Budiarjo, Mariam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Budiman, Arief, *Teori Negara : Negara, Kekuasaan, dan Ideologi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dahl, Robert. A, *Perihal Demokrasi: menjelajah teori dan praktek demokrasi secara singkat*, penj, A. Rahman Zainudin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011.
- Dahm, Bernhard, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, alih bahasa, Hasan Basri Jakarta: LP3ES, 1987.
- El- Afandi, Abdel Wahab, *Masyarakat Tak Bernegara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Haydar, Hamid Hadji, "Filsafat Politik Imam Khomeini", dalam *AL-HUDA*, Vol. III, Nomor. 4 (2001).
- Jindan, Khalid Ibrahim, *Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Khomeini, Imam, *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan: konsep wilayah faqih sebagai epistemologi pemerintahan Islam*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2010.
- Khomeini, Imam, *Pesan Sang Imam*, Sandy Alison (pengh & pen), cet. I Bandung: Aljawad, 2000.
- Lubis, M. Solly, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Maarif, A. Syafi'i, *Islam dan Politik Di Indonesia: Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Masdar, Umarudin, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Maulani, ZA, *Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: CRDS Kalimantan-Pusataka Pelajar, 2000.

- Natsir, M, *Capita Selecta*, Djakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Nurtjahjo, Hendra, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Rahmat, Jalaludin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1995.
- Salim, Solichin, *Bung Karno Putera Fajar*, Jakarta: Gunung Agung, 1984.
- Satori, Akhmad, *Sistem Pemerintahan Iran Modern : konsep wilayahul faqih Imam Khomeini sebagai teologi politik dalam relasi agama dan demokrasi*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2012.
- Sihbudi, Reza, *Biografi Politik Imam Khomeini*, Jakarta: Gramedia dan ISMES, 1996.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Buku Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.
- Sulaiman, M. Munandar, *Dinamika Masyarakat Transisi, Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*, cet. I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Susilo, Taufik Adi *Soekarno: Biografi Singkat (1901-1970)*, Jogjakarta: GARASI, 2010.
- Taimiyah, Ibnu, *Tugas Negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Thaha, Idris, *Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Madjid dan M. Amien Rais*, Jakarta: TERAJU, 2004.

Yamani (pengh & pen), *Wasiat Sufi Ayatullah Khomeini*, cet. II
Bandung: Mizan, 2002.

Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam*,
Bandung: Mizan, 2002.

Yatim, Badri, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos
Wacana Ilmu, 1999.

C. Skripsi

Amran, Joni, *Demokrasi Dalam Pandangan Ayatullah Imam Khomeini*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Maksun, *Studi Perbandingan Pemikiran Imam Khomeini dan Kuntowijoyo Tentang Negara dan Demokrasi*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Salahuddin, *Demokrasi Menurut Soekarno dan Muhammad Hatta (studi perbandingan)*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2004.

Wahyuni, Sri Puji, *Pemikiran Ir. Soekarno Tentang Demokrasi*, Skripsi tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga, 2002.

D. Website

<http://poetracerdas.blogspot.com/2009/04/demokrasi-liberal-demokrasi-komunis-dan.html>

LAMPIRAN I

No	Halaman	Definisi istilah
1	1	<p>Theokrasi adalah cara memerintah Negara berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung memerintah Negara, hukum yang berlaku adalah hukum Tuhan, pemerintahan dipegang oleh ulama' atau otoritas keagamaan.</p> <p>Monarkhi adalah bentuk pemerinthan yang dikepalai oleh raja.</p>
2	2	<p>Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh.</p> <p>Demokrasi liberal adalah sistem politik dengan banyak partai atau parlementer.</p>
3	5	<p>Sekulerisme adalah pemahaman terhadap pemisahan antara agama dan Negara.</p>
4	8	<p>Founding fathers adalah biasanya sebagai penyebutan terhadap orang yang berjasa mendirikan sebuah Negara melalui perjuangan.</p>
5	13	<p>Otoriter adalah suatu pemerintahan berkekuasaan tunggal.</p>
6	30	<p>Islam konservatif adalah suatu pemahaman terhadap</p>

7	32	<p>islam dengan mempertahankan, menjalankan hukum islam yang berlaku sejak dulu.</p> <p>Syura adalah proses memaparkan berbagai pendapat yang beraneka ragam dan disertai sisi argumentatif dalam suatu perkara atau permasalahan, diuji oleh para ahli yang cerdas dan berakal, agar dapat mencetuskan solusi yang tepat dan terbaik untuk diamalkan sehingga tujuan yang diharapkan dapat terealisasi.</p> <p>Islam moderat adalah corak pemahaman Islam yang menolak cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh kalangan lain yang menganut model Islam radikal.</p>
8	72	<p>Kapitalis adalah orang atau golongan yang mempunyai modal yang besar (kaum pemodal).</p> <p>Imperialis adalah suatu bangsa yang menjajah untuk kepentingan industry dan modal (bangsa penjajah).</p>
9	78	<p>Mazhab Syi'ah adalah salah satu aliran dalam Islam yang hanya mengakui kepemimpinan Ali setelah wafatnya Rasulullah SAW.</p>
10	79	<p>Fundamentalisme adalah pemahaman terhadap agama yang bersifat kolot dan reaksioner yang selalu merasa harus kembali kepada ajaran yang seperti tersurat di dalam kitab suci.</p>
11	80	<p>Sinkretisme adalah paham atau aliran yang merupakan</p>

12	84	<p>perpaduan dari berbagai aliran atau ideology untuk mencari keserasian atau keseimbangan.</p> <p>Feodal adalah kaum bangsawan yang memiliki kekuasaan tanah (penguasa tanah).</p> <p>Borjuis suatu kelas masyarakat yang tergolong kalangan menengah ke atas.</p> <p>Proletar adalah kelas social yang paling rendah, atau dominan sebagai kalangan buruh yang tidak mempunyai alat produksi.</p>
13	90	<p>Diktator adalah kepala pemerintahan yang mempunyai kekuasaan mutlak, yang biasanya diperoleh dengan cara kekerasan dan tidak demokratis.</p>

LAMPIRAN II

Pasal 33 UUD 45 sebelum amandemen (halaman 77)

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

LAMPIRAN III

Konstitusi Republik Islam Iran Pasal 110 (halaman 88)

Faqih berwenang mengangkat dan memberhentikan para fuqaha anggota Dewan Perwalian (Shunye Negahban); Pejabat Kehakiman Tertinggi Negara; Kepala Staf Gabungan dan Komandan Korps Garda Revolusi Islam Nasional, mengangkat Komandan Ketiga Angkatan Bersenjata atas usulan Dewan Tertinggi Pertahanan Nasional, menyatakan perang dan damai; dan mengesahkan serta pemberhentian Presiden.

LAMPIRAN IV

BIOGRAFI TOKOH

1. Abu 'Ala al-Maududi

Nama lengkap pemikir besar Islam kontemporer dari benua India ini adalah Abu al-A'la al-Maududi, namun untuk selanjutnya disebut Maududi. Dia dilahirkan pada tanggal 25 September 1903 M/ 4 Rajab 1321 H di Arangabad, India Tengah, dan wafat pada tanggal 23 September 1979 M/ 2 Dzulqo'dah 1399 H di salah satu rumah sakit di New York, Amerika Serikat. Pada tahun 1941 Abu al-A'la al-Maududi bersama dengan tujuh puluh lima pengikutnya, mendirikan suatu organisasi yang diberi nama *Jamiah Islamiyah*. Sebagaimana *al-Ikhwān al-Muslimīn* organisasi itu pada permulaannya lebih merupakan gerakan ideology dari pada gerakan politik, hingga berdirinya Negara Pakistan. Pokok pikirannya tentang kenegaraan dituangkan dalam enam risalah : *teori politik Islam, Metode Revolusi Islam, hukum Islam dan Pelaksanaannya, kodifikasi konstitusi Islam, hak-hak golongan dzimmi dalam Negara, prinsip dasar Negara Islam*.

2. Munawir Sadjali

Beliau adalah seorang intelektual, tokoh Agama dan menteri Agama pada kabinet pembangunan V (1988-1993). Lahir di Klaten, 7 November 1925, tamat sekolah di Mambaul Ulum Solo lalu menjadi guru di Ungaran Semarang. Meniti karirnya di Departemen Luar Negeri sejak tahun 1950. Pernah menjadi wakil kepala perwakilan RI di London (1971-1974), lalu

menjadi Dubes RI di Kuwait, Bahrain, Qatar (1976-1980). Pendidikan tingginya diperoleh dari University of Esceter, Inggris (1953-1954), dan Goegtown University, Washington D.C dan meraih gelar M.A dengan tesis "*Indonesia Muslim Parties and Ther Political concepts*" (1959). Sebagai pengajar pada fakultas pasca sarjana IAIN (sekarang) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengajar al-Fiqh al-Siyasah. Salah satu pikirannya yang mengundang polemik adalah gagasan tentang reaktualisasi ajaran Islam.

3. Bernhard Dahm

Pemerhati budaya dan politik Asia Tenggara ini dilahirkan pada tanggal 30 Agustus 1912 di Siegen. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah pada tahun 1932 di Dillenburg, dia langsung memasuki bangku kuliah untuk mengambil jurusan sastra inggris dan ilmu politik di Universitas Marburg dan Kiel. Setelah lulus pada tahun 1960 dia langsung mendapat beasiswa untuk melanjutkan studinya di Belanda dengan konsentrasi pada studi sejarah dan budaya Indonesia. Kemudian dia mengajar di Kiel tentang sejarah non-Eropa pada tahun 1973-1984. Dan ia terpilih sebagai ketua studi Asia Tenggara di Universitas Passau dari tahun 1984-1997. Salah satu titik fokus ajarannya ialah tradisi budaya pra colonial dan setelah perang dunia kedua di kawasan Asia Tenggara.

BIODATA PENULIS

Nama : Ahmad Wahyudin

Tempat tanggal lahir : Ciamis, 29 Oktober 1988

Alamat : Dsn Karanghonje, Rt/w 17/07. Ds Sindangwangi,
Kec Padaherang, Kab Pangandaran.

Nama orang tua

Ayah : Suwanto

Ibu : Darsiti

Alamat : Dsn Karanghonje, Rt/w 17/07. Ds Sindangwangi,
Kec Padaherang, Kab Pangandaran.

Riwayat Pendidikan :

- SDN CIGANJENG III. Kec. Padaherang, Kab. Ciamis. (lulus 2001)
- SMPN 3 PADAHERANG. Kec. Padaherang, Kab. Ciamis. (lulus 2004)
- SMK SILIWANGI AMS BANJARSARI. Kec. Banjarsari, Kab. Ciamis.(lulus 2007)
- Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (angkatan 2008)